



Dari Eksklusi Digital menuju Ketahanan Kooperatif: Literasi Digital dan Keuangan Partisipatif bagi Usaha Mikro Perempuan di Filipina dan Vietnam

Nofyan Kusuma¹

Department of Development Studies

Universitas Gadjah Mada

Email: nofyan Kusuma.ac.id

Phone Number : +6285-xxxx-xxxx (For send LoA)

Abstract (English) :

This article analyzes how participatory digital and financial literacy interventions can strengthen women-led microenterprises in Southeast Asia by transforming digital exclusion into community economic resilience. Comparing women microenterprises in the Philippines and Vietnam, the article develops a community service analysis that links community vulnerability, participatory interventions, empowerment mechanisms, behavior change, and livelihood sustainability. The study employs a comparative community intervention analysis approach grounded in participatory action research, empowerment theory, and documentary evidence from ASEAN, the OECD, the ADB, ERIA, UNESCO, UNDP, GSMA, and documented community initiatives. Findings indicate that digital literacy is inadequate if women entrepreneurs still face barriers such as work informality, limited access to finance, weak digital security, market dependence, domestic care burdens, and uneven institutional support. In the case of the Philippines, key empowerment pathways are shaped by access to digital finance, readiness for business formalization, and local mentoring ecosystems. In the case of Vietnam, empowerment is mediated by cooperative organizations, information technology-based traceability, peer learning, and women's networks. This article contributes to the study of community service by offering a participatory digital-economic empowerment model for women's micro-enterprises in Southeast Asia.

Keywords: *community service; women entrepreneurs; digital literacy; financial inclusion; MSMEs; participatory action research; Southeast Asia; Philippines; Vietnam; community empowerment*

Abstrak (Indonesia)

Artikel ini menganalisis bagaimana intervensi literasi digital dan keuangan berbasis partisipasi dapat memperkuat usaha mikro yang dipimpin perempuan di Asia Tenggara melalui transformasi eksklusi digital menjadi ketahanan ekonomi komunitas. Dengan membandingkan perempuan pelaku usaha mikro di Filipina dan Vietnam, artikel ini mengembangkan analisis pengabdian kepada masyarakat yang menghubungkan kerentanan komunitas, intervensi partisipatif, mekanisme pemberdayaan, perubahan perilaku, dan keberlanjutan penghidupan. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis intervensi komunitas komparatif yang berpijak pada participatory action research, teori pemberdayaan, serta bukti dokumenter dari ASEAN, OECD, ADB, ERIA, UNESCO,



UNDP, GSMA, dan inisiatif komunitas terdokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa literasi digital tidak memadai apabila perempuan pelaku usaha masih menghadapi hambatan informalitas kerja, akses pembiayaan terbatas, keamanan digital yang lemah, ketergantungan pasar, beban perawatan domestik, dan dukungan kelembagaan yang tidak merata. Dalam kasus Filipina, jalur pemberdayaan utama dibentuk oleh akses keuangan digital, kesiapan formalisasi usaha, dan ekosistem pendampingan lokal. Dalam kasus Vietnam, pemberdayaan dimediasi oleh organisasi koperasi, ketertelusuran berbasis teknologi informasi, pembelajaran sejawat, dan jaringan perempuan. Artikel ini berkontribusi pada kajian pengabdian masyarakat dengan menawarkan model pemberdayaan digital-ekonomi partisipatif bagi usaha mikro perempuan di Asia Tenggara.

Kata kunci: pengabdian masyarakat; perempuan wirausaha; literasi digital; inklusi keuangan; UMKM; riset aksi partisipatif; Asia Tenggara; Filipina; Vietnam; pemberdayaan komunitas

Pendahuluan

Kajian pengabdian kepada masyarakat di Asia Tenggara saat ini bergerak dalam lanskap pembangunan yang ditandai oleh percepatan digital, kerentanan penghidupan, ketimpangan gender, risiko iklim, dan kapasitas kelembagaan lokal yang tidak merata. Kawasan ini sering dipahami sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital paling dinamis di dunia, tetapi transformasi digital tersebut tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan yang inklusif. Dalam visi jangka panjang ASEAN, pembangunan kawasan diarahkan menuju masyarakat yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada manusia, dengan penekanan pada partisipasi bermakna, pembangunan sosial, penguatan kapasitas, dan kesejahteraan bersama (ASEAN Secretariat, 2025). Pada saat yang sama, laporan pembangunan internasional menunjukkan bahwa kemajuan manusia masih menghadapi hambatan serius akibat ketimpangan, polarisasi, krisis kepercayaan, dan lemahnya kerja sama sosial-politik dalam menjawab persoalan struktural (UNDP, 2024). Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat tidak lagi cukup dipahami sebagai bantuan jangka pendek, penyuluhan satu arah, atau kegiatan filantropis. Pengabdian masyarakat perlu dikonstruksi sebagai proses partisipatif, berbasis tindakan, terukur, dan terlembaga yang memungkinkan komunitas memperoleh kapasitas, sumber daya, pengetahuan, serta daya kolektif untuk menghadapi kerentanan sosial-ekonomi.

Persoalan tersebut sangat relevan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipimpin perempuan di Asia Tenggara. UMKM merupakan penyangga utama penghidupan rumah tangga, ekonomi lokal, dan ketahanan komunitas, tetapi perempuan pelaku usaha sering berada pada persilangan antara informalitas, keterbatasan modal, rendahnya kapasitas digital, mobilitas terbatas, serta norma sosial



yang memengaruhi akses mereka terhadap pasar dan teknologi. Toolkit kebijakan ASEAN mengenai kewirausahaan perempuan menegaskan bahwa akses pembiayaan, pasar, keterampilan, jaringan, norma sosial-budaya, keterampilan digital, transisi menuju e-commerce, dan beban perawatan domestik merupakan hambatan yang saling berhubungan bagi usaha yang dimiliki atau dipimpin perempuan (ASEAN Secretariat, 2022). OECD juga menekankan bahwa kewirausahaan perempuan di wilayah terpencil memerlukan dukungan yang berbasis tempat, berpusat pada manusia, dan disesuaikan dengan kondisi lokal karena digitalisasi hanya memperluas akses terhadap pasar, pembiayaan, dan pelatihan apabila infrastruktur, keterampilan, norma sosial, dan dukungan kelembagaan diperhatikan secara simultan (OECD, 2025). Oleh karena itu, pemberdayaan usaha perempuan tidak dapat direduksi menjadi pelatihan bisnis semata. Ia harus dipahami sebagai agenda pengabdian masyarakat yang menghubungkan akses digital, literasi keuangan, perlindungan sosial, partisipasi pasar, dan pengakuan kelembagaan.

Inklusi digital telah menjadi salah satu dimensi paling penting sekaligus paling problematis dalam pembangunan Asia Tenggara. Analisis ERIA mengenai ekonomi digital inklusif di ASEAN menunjukkan bahwa inklusi tidak dapat dibatasi pada ketersediaan konektivitas internet, melainkan harus mencakup keterampilan digital, kesenjangan gender, keuangan digital, ketimpangan desa-kota, dan pemberdayaan UMKM sebagai isu pembangunan yang saling terkait (Sefrina, 2024). Policy brief ASEAN tentang literasi dan transformasi digital juga menempatkan transformasi digital sebagai isu reformasi pendidikan, pembelajaran sepanjang hayat, kesiapan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan yang dapat diakses secara adil oleh masyarakat di negara-negara anggota ASEAN (Pascua-Valenzuela, 2025). GSMA melaporkan bahwa teknologi dan layanan seluler memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Asia-Pasifik, tetapi makna pembangunan dari teknologi seluler sangat bergantung pada kemampuan komunitas untuk mengubah konektivitas menjadi penggunaan yang aman, bermakna, dan produktif (GSMA, 2025). Bagi perempuan pelaku usaha mikro, proses konversi ini tidak bersifat otomatis. Platform digital dapat membuka kanal pemasaran, tetapi juga membawa risiko privasi, penipuan, pelecehan daring, ketergantungan terhadap algoritma, dan ketimpangan akses terhadap pembayaran digital.

Masalah komunitas yang dianalisis dalam artikel ini karena itu bukan sekadar rendahnya literasi digital. Masalah yang lebih mendasar ialah defisit pemberdayaan yang dialami perempuan pelaku usaha mikro ketika transformasi digital berjalan lebih cepat daripada kapasitas komunitas, dukungan kelembagaan, dan kebijakan yang responsif gender. Di Filipina, perempuan pelaku usaha memiliki kontribusi penting dalam aktivitas UMKM, tetapi masih menghadapi hambatan pembiayaan, pengembangan usaha, dan partisipasi dalam pasar formal. ADB menunjukkan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari ekonomi Filipina, sementara UMKM yang dimiliki perempuan menghadapi hambatan berkelanjutan dalam mengakses layanan



keuangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha (ADB, 2023). Di Vietnam, tantangannya muncul melalui konfigurasi kelembagaan yang berbeda tetapi tetap berkaitan, yaitu perempuan produsen sering bergantung pada koperasi, asosiasi lokal, dan sistem pemasaran kolektif. Teknologi informasi dapat memperkuat ketertelusuran produk, visibilitas pasar, dan kapasitas organisasi apabila tertanam dalam tata kelola koperasi. Studi IIED tentang Tu Nhien Cooperative menunjukkan bagaimana perangkat teknologi informasi digunakan oleh koperasi yang dipimpin perempuan untuk mendukung ketertelusuran dan pemberdayaan kewirausahaan perempuan produsen (Nhuan, 2024).

Literatur yang ada telah memberikan penjelasan penting, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menjelaskan persoalan ini. Teori conscientization Freire (1970) tetap fundamental karena memandang pemberdayaan sebagai proses ketika kelompok marginal membaca secara kritis kondisi sosialnya dan bertindak secara kolektif untuk mengubahnya. Chambers (1994) mengembangkan participatory rural appraisal sebagai kritik terhadap pembangunan yang dipaksakan dari luar dengan menempatkan pengetahuan lokal, pemetaan partisipatif, dan prioritas komunitas sebagai dasar intervensi. Sen (1999) menggeser pemahaman pembangunan dari distribusi sumber daya semata menuju perluasan kebebasan substantif, sementara Kabeer (1999) menjelaskan pemberdayaan melalui hubungan antara resources, agency, dan achievements. Arnstein (1969) membedakan partisipasi simbolik dari kekuasaan warga, sedangkan Cornwall (2008) mengingatkan bahwa partisipasi dapat terdepolitisasi apabila lembaga hanya mengundang keterlibatan komunitas tanpa mendistribusikan pengaruh nyata. Kerangka-kerangka tersebut menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat tidak boleh dinilai hanya dari kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana peserta memperoleh kapasitas pengambilan keputusan dan kendali atas lintasan pembangunan komunitasnya.

Kajian mutakhir tentang inklusi digital dan kewirausahaan perempuan memperluas perdebatan tersebut. Penelitian mengenai perempuan wirausaha dalam ekonomi digital menunjukkan bahwa akses teknologi dapat memperluas jangkauan pasar, tetapi juga dapat mereproduksi ketimpangan apabila pelatihan digital mengabaikan keterbatasan waktu berbasis gender, risiko platform, dan ketimpangan akses pembiayaan (IFC, 2021; OECD, 2025). Kajian tentang literasi digital berbasis komunitas menegaskan bahwa pelatihan lebih efektif apabila terhubung dengan tugas bisnis praktis, pendampingan sejawat, dan alat digital yang benar-benar tersedia secara lokal, bukan sekadar pengajaran teknologi abstrak (UNESCO, 2023; Sefrina, 2024). Studi tentang transformasi digital UMKM juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi bergantung pada kapabilitas internal, kepercayaan manajerial, dukungan eksternal, dan ekosistem kelembagaan, bukan semata-mata pada ketersediaan perangkat digital (Lokuge & Duan, 2023). Kajian kebijakan publik tentang UMKM perempuan juga



menunjukkan bahwa ketiadaan data usaha yang terpilah berdasarkan gender menjadi hambatan bagi perumusan program berbasis bukti (ASEAN Secretariat, 2022).

Namun, literatur pengabdian masyarakat saat ini masih terbatas dalam lima aspek. Pertama, banyak intervensi literasi digital mengukur keberhasilan berdasarkan penyelesaian kegiatan, bukan pada capaian pemberdayaan seperti peningkatan kepercayaan diri, perilaku digital yang lebih aman, dokumentasi usaha yang lebih sistematis, atau peningkatan kendali atas pendapatan. Kedua, kajian empiris sering memperlakukan perempuan pelaku usaha sebagai peserta individual, bukan sebagai bagian dari rumah tangga, koperasi, pasar informal, dan jaringan tata kelola lokal. Ketiga, literatur belum cukup membandingkan konteks kelembagaan Asia Tenggara yang berbeda, padahal hasil pengabdian masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran barangay, koperasi, organisasi perempuan, pemerintah lokal, universitas, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Keempat, desain intervensi partisipatif sering dijelaskan secara prosedural, tetapi belum dianalisis secara kausal. Kelima, keberlanjutan sering dinyatakan sebagai harapan, bukan dievaluasi melalui mekanisme kesinambungan, kepemilikan lokal, pendampingan pascapelatihan, dan integrasi kelembagaan.

Kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan kerangka pengabdian masyarakat komparatif yang menghubungkan eksklusi digital, pemberdayaan usaha perempuan, intervensi partisipatif, dan ketahanan penghidupan berkelanjutan dalam dua konteks Asia Tenggara. Artikel ini tidak memperlakukan literasi digital sebagai intervensi pendidikan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pemberdayaan yang lebih luas, mencakup literasi keuangan, keamanan digital, akses pasar, pembelajaran koperatif, rujukan kelembagaan, dan pemantauan berbasis komunitas. Filipina dan Vietnam dipilih bukan sebagai kasus yang mewakili secara statistik seluruh Asia Tenggara, melainkan sebagai kasus yang kontras secara analitis. Kasus Filipina menggambarkan pentingnya keuangan digital, pendampingan usaha lokal, dan jalur formalisasi dalam ekonomi jasa dengan partisipasi perempuan yang kuat dalam usaha mikro. Kasus Vietnam menggambarkan bagaimana organisasi koperasi, ketertelusuran berbasis teknologi informasi, dan transfer pengetahuan sejawat dapat mengubah keterampilan digital menjadi kemampuan pasar kolektif. Perbandingan ini memungkinkan artikel mengidentifikasi mekanisme pemberdayaan yang khas konteks dan yang berpotensi ditransfer ke program pengabdian masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Kerangka analitis artikel ini dirumuskan sebagai berikut: **kerentanan digital-ekonomi → asesmen kebutuhan partisipatif → intervensi literasi digital dan keuangan → penguatan kapasitas dan pendampingan sejawat → perubahan perilaku dan kemampuan usaha → ketahanan komunitas berkelanjutan**. Dalam kerangka ini, kerentanan tidak hanya dimaknai sebagai kemiskinan atau ketiadaan perangkat, melainkan sebagai interaksi antara keterampilan terbatas, posisi tawar pasar yang lemah,



paparan risiko berbasis gender, dan dukungan kelembagaan yang tidak memadai. Intervensi partisipatif merujuk pada pelatihan yang dirancang bersama, fasilitasi sejawat, pemetaan masalah lokal, dan validasi komunitas. Penguatan kapasitas mencakup keamanan digital, literasi e-commerce, pencatatan keuangan, penggunaan platform, komunikasi pelanggan, dan pemasaran kolektif. Perubahan perilaku mencakup praktik daring yang lebih aman, dokumentasi usaha yang lebih sistematis, peningkatan kepercayaan diri, dan partisipasi lebih besar dalam sistem dukungan formal. Ketahanan berkelanjutan merujuk pada kemampuan perempuan pelaku usaha dan lembaga komunitas untuk terus beradaptasi setelah intervensi pengabdian formal berakhir.

Tujuan artikel ini adalah menganalisis bagaimana intervensi literasi digital dan keuangan berbasis partisipasi dapat memperkuat hasil pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro di Filipina dan Vietnam, serta mengembangkan kerangka pengabdian masyarakat Asia Tenggara yang menjelaskan hubungan antara masalah komunitas, intervensi partisipatif, mekanisme pemberdayaan, hasil sosial terukur, dan implikasi keberlanjutan.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis intervensi komunitas komparatif yang berlandaskan participatory action research, community-based participatory research, dan teori pemberdayaan. Logika metodologisnya menghubungkan pedagogi kritis Freire, pendekatan kapabilitas Sen, dan pengembangan UMKM responsif gender dengan memperlakukan perempuan pelaku usaha mikro bukan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai aktor komunitas yang pengetahuan, hambatan, dan aspirasinya membentuk desain intervensi. Dua kasus dipilih melalui theoretical sampling, bukan sampling statistik. Kasus Filipina merepresentasikan jalur inklusi digital-keuangan ketika perempuan pelaku usaha mikro membutuhkan akses lebih kuat terhadap pembiayaan, informasi pasar, dokumentasi usaha, dan sistem dukungan lokal. Kasus Vietnam merepresentasikan jalur koperasi berbasis teknologi informasi ketika perempuan produsen menggunakan organisasi kolektif, ketertelusuran produk, dan pembelajaran sejawat untuk memperkuat partisipasi pasar. Unit analisis artikel ini bukan hanya individu pelaku usaha, melainkan ekosistem usaha berbasis komunitas yang melibatkan perempuan pelaku UMKM, pemerintah lokal, fasilitator pelatihan, koperasi, organisasi perempuan, perantara layanan keuangan, universitas, dan lembaga pembangunan. Logika intervensi direkonstruksi melalui bukti dokumenter, laporan kebijakan, kajian pengabdian masyarakat yang telah dipublikasikan, laporan kelembagaan, dan inisiatif pelatihan komunitas yang terdokumentasi. Karena tidak tersedia data lapangan primer yang belum dipublikasikan untuk artikel ini, naskah tidak mengklaim hasil survei rumah tangga, nama responden, atau statistik dampak lokal



yang tidak dapat diverifikasi. Evaluasi difokuskan pada domain hasil yang dapat diukur dalam praktik pengabdian masyarakat, yaitu kepercayaan diri digital, penggunaan platform secara aman, pencatatan keuangan, dokumentasi usaha, akses pendampingan, visibilitas pasar, transfer pengetahuan sejawat, dan kesinambungan kelembagaan.

Data disintesis dari dokumen kebijakan ASEAN, laporan OECD dan ADB tentang kewirausahaan perempuan serta inklusi keuangan, analisis ERIA tentang ekonomi digital inklusif, materi kebijakan pendidikan UNESCO dan ASEAN, bukti konektivitas GSMA, analisis pembangunan manusia UNDP, serta inisiatif komunitas terdokumentasi di Vietnam dan Filipina. Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahap terpadu, yaitu interpretasi kebutuhan komunitas, pemetaan mekanisme intervensi, perbandingan lintas kasus, dan penilaian keberlanjutan. Kebutuhan komunitas dianalisis dengan mentriangulasi bukti tentang keterampilan digital, akses keuangan, kendala usaha informal, hambatan gender, risiko platform, kapasitas koperasi, dan ekosistem kelembagaan lokal. Mekanisme intervensi dianalisis dengan pendekatan theory of change yang menghubungkan diagnosis masalah, pelatihan partisipatif, pendampingan, pembelajaran sejawat, dan hasil pemberdayaan terukur. Keabsahan kajian diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teoritis, penalaran kasus negatif, serta perbedaan eksplisit antara bukti terdokumentasi dan implikasi pengabdian masyarakat yang bersifat inferensial. Pertimbangan etis ditempatkan melalui penghindaran klaim data primer yang tidak tersedia, pembahasan kelompok komunitas secara anonim ketika persetujuan individual tidak tersedia, serta penghormatan terhadap otonomi komunitas dalam memaknai hasil pemberdayaan. Keterbatasan utama artikel ini adalah penggunaan bukti dokumenter dan komparatif, bukan eksperimen lapangan primer; namun keterbatasan tersebut sekaligus memperjelas posisi kontribusi artikel sebagai kerangka pengabdian masyarakat yang teoritis, berbasis bukti, relevan secara kebijakan, dan dapat diuji lebih lanjut melalui implementasi komunitas.

Temuan dan Pembahasan

1. Asesmen Kebutuhan Komunitas: Eksklusi Digital sebagai Masalah Gender, Ekonomi, dan Kelembagaan

Bukti komparatif menunjukkan bahwa eksklusi digital di kalangan perempuan pelaku usaha mikro bukan sekadar kekurangan teknologi. Ia merupakan masalah komunitas yang berlapis, dibentuk oleh informalitas ekonomi, ekspektasi sosial berbasis gender, akses keuangan yang tidak merata, rendahnya kepercayaan diri dalam menggunakan perangkat digital, serta lemahnya integrasi antara pelatihan komunitas dan dukungan kelembagaan. Dalam kasus Filipina, persoalan komunitas sangat berkaitan dengan inklusi keuangan dan pertumbuhan usaha. ADB menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu kekuatan penting ekonomi Filipina, tetapi usaha yang dimiliki perempuan masih menghadapi kendala besar dalam mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha (ADB, 2023). OECD juga



menekankan bahwa kewirausahaan perempuan di wilayah terpencil memerlukan dukungan yang berbasis tempat dan berpusat pada manusia karena digitalisasi hanya dapat memperluas akses pasar dan pembiayaan apabila infrastruktur, keterampilan, pembiayaan, dan norma sosial ditangani secara terpadu (OECD, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pengabdian masyarakat di Filipina bukan hanya mengajarkan perempuan menggunakan platform digital, tetapi menghubungkan literasi digital dengan dokumentasi bisnis, kesiapan pembiayaan, keamanan transaksi, dan akses terhadap ekosistem pendampingan formal.

Dalam kasus Vietnam, masalahnya memiliki dimensi koperasi dan rantai pasok yang lebih kuat. Studi IIED tentang Tu Nhien Cooperative mendokumentasikan bagaimana teknologi informasi dapat mendukung perempuan produsen melalui sistem ketertelusuran digital dan layanan koperasi (Nhuan, 2024). Inisiatif RMIT Vietnam juga menunjukkan bahwa perempuan wirausaha berpenghasilan rendah di Ho Chi Minh City dan Hanoi menerima pelatihan literasi digital dan kemudian menyalurkan pengetahuan tersebut kepada jaringan perempuan yang lebih luas (RMIT University Vietnam, 2024). Inisiatif-inisiatif ini memperlihatkan bahwa inklusi digital di Vietnam dimediasi oleh kanal pembelajaran kolektif, struktur koperasi, dan jaringan perempuan. Berbeda dari model usaha yang murni individual, kasus Vietnam menunjukkan bahwa pemberdayaan digital dapat muncul melalui difusi berbasis komunitas, ketika kelompok inti memperoleh pelatihan, menyesuaikan pengetahuan dengan praktik kewirausahaan lokal, lalu menyebarkannya melalui jaringan sejawat.

Perbandingan lintas kasus menunjukkan perbedaan penting. Di Filipina, literasi digital perlu diintegrasikan dengan inklusi keuangan dan formalisasi usaha mikro. Di Vietnam, literasi digital perlu diintegrasikan dengan tata kelola koperasi, ketertelusuran produk, pembelajaran sejawat, dan keamanan digital. Kedua kasus memiliki persoalan bersama, yaitu perempuan pelaku usaha diharapkan berpartisipasi dalam pasar digital tanpa akses yang setara terhadap pengetahuan, perlindungan, pembiayaan, dan jaringan kelembagaan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari pasar tersebut. Namun arsitektur intervensinya berbeda karena ekologi kelembagaan lokal juga berbeda. Dukungan tingkat barangay, program inklusi keuangan, dan pendampingan usaha membentuk jalur Filipina, sementara koperasi, jaringan perempuan, dan sistem produsen berbasis teknologi informasi membentuk jalur Vietnam.

Temuan ini mendukung teori pemberdayaan karena menunjukkan bahwa sumber daya saja tidak menghasilkan pemberdayaan apabila perempuan tidak dapat menjalankan agency dan mencapai hasil sosial yang bermakna (Kabeer, 1999). Temuan ini juga mengafirmasi argumen Sen (1999) bahwa pembangunan pada dasarnya berkaitan dengan perluasan kapabilitas, bukan semata-mata penyediaan input. Pelatihan digital dapat memberikan informasi, tetapi pemberdayaan terjadi hanya ketika perempuan mampu menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih aman, menjangkau pelanggan, mengelola pendapatan, menegosiasikan peran



dalam rumah tangga dan pasar, serta mempertahankan aktivitas usaha. Oleh sebab itu, asesmen kebutuhan komunitas harus melampaui pertanyaan tentang kepemilikan perangkat atau akses internet. Asesmen harus menanyakan apakah perempuan mampu mengubah akses digital menjadi kendali, kepercayaan diri, partisipasi pasar, dan ketahanan kolektif.

2. Desain Intervensi Partisipatif: Dari Penyampaian Pelatihan menuju Pembelajaran Komunitas yang Diproduksi Bersama

Program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa desain intervensi partisipatif paling efektif ketika isi pelatihan lahir dari persoalan usaha yang dialami komunitas, bukan dari modul digital standar yang dipaksakan dari luar. Dalam kasus Filipina, desain intervensi yang relevan perlu dimulai dengan pemetaan partisipatif atas aktivitas usaha perempuan, hambatan pembiayaan, kanal pelanggan, penggunaan pembayaran digital, dan praktik dokumentasi usaha. Proses partisipatif tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam modul praktis seperti keamanan pembayaran digital, pembukuan dasar, kesiapan dokumen pembiayaan, komunikasi pelanggan, penjualan melalui media sosial, pencegahan penipuan, dan rujukan ke lembaga pendukung usaha lokal. Pendekatan ini sejalan dengan toolkit ASEAN tentang kewirausahaan perempuan yang menekankan pentingnya data dasar, pemantauan responsif gender, dan dukungan kebijakan bagi UMKM yang dimiliki dan dipimpin perempuan (ASEAN Secretariat, 2022).

Dalam kasus Vietnam, desain intervensi partisipatif menuntut perhatian lebih besar pada sistem usaha kolektif. Pelatihan tidak hanya mengajarkan individu cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga memperkuat ketertelusuran koperasi, dokumentasi produk, merek bersama, komunikasi digital dengan pembeli, dan tata kelola internal. Kasus Tu Nhien Cooperative memperlihatkan bahwa layanan dan alat teknologi informasi dapat berkontribusi pada pemberdayaan kewirausahaan perempuan ketika tertanam dalam struktur koperasi (Nhuan, 2024). Inisiatif RMIT Vietnam memperlihatkan mekanisme lain, yaitu melatih kelompok perempuan pelaku usaha berpenghasilan rendah dan memungkinkan mereka mentransfer pengetahuan kepada jaringan yang lebih luas (RMIT University Vietnam, 2024). Hal ini mencerminkan logika pengabdian masyarakat ketika perempuan tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga pengganda pengetahuan.

Bukti komparatif mengungkap dua mekanisme partisipatif yang berbeda. Model Filipina bergantung pada **partisipasi berbasis keterhubungan layanan**, yaitu pelatihan perempuan yang dikaitkan dengan pemerintah lokal, lembaga keuangan, pusat kewirausahaan, dan mentor komunitas. Model Vietnam bergantung pada **partisipasi berbasis difusi sejawat**, yaitu perempuan dan koperasi yang telah dilatih menjadi kanal penyebaran pengetahuan, norma, dan praktik digital di komunitasnya. Kedua model meninggalkan pendekatan pelatihan top-down karena menempatkan pengalaman perempuan sebagai dasar desain kurikulum. Keduanya juga menjawab kelemahan



dalam banyak program literasi digital, yaitu asumsi bahwa kompetensi teknis sudah cukup. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis harus dikombinasikan dengan kepercayaan diri kontekstual, kesadaran risiko, dan kemampuan menavigasi lembaga.

Hal ini sejalan dengan pandangan Freire (1970) bahwa pendidikan menjadi transformatif ketika peserta belajar membaca secara kritis kondisi kehidupannya dan bertindak atas kondisi tersebut. Temuan ini juga memperluas pendekatan partisipatif Chambers (1994) dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan digital memerlukan alat diagnosis komunitas, bukan sekadar penyampaian pelatihan. Secara praktis, fasilitator pengabdian masyarakat perlu memulai dengan pertanyaan seperti: platform apa yang sudah digunakan perempuan? Risiko apa yang pernah mereka alami? Apa yang mencegah mereka menggunakan pembayaran digital? Dokumen apa yang diminta lembaga keuangan? Siapa dalam komunitas yang dapat menjadi mentor sejawat? Lembaga lokal mana yang dapat menjaga keberlanjutan program? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggeser intervensi dari transfer pengetahuan satu arah menuju ekosistem pembelajaran yang diproduksi bersama.

3. Hasil Pemberdayaan: Mengukur Kapabilitas, Agency, dan Perubahan Perilaku

Hasil intervensi menunjukkan bahwa partisipasi komunitas memengaruhi pemberdayaan ketika hasil diukur melampaui kehadiran dan kepuasan peserta. Dalam banyak kegiatan pengabdian masyarakat, keberhasilan dilaporkan melalui jumlah peserta, jumlah sesi pelatihan, atau jumlah materi yang dibagikan. Indikator tersebut berguna secara administratif, tetapi tidak cukup untuk menangkap pemberdayaan. Evaluasi pengabdian masyarakat yang lebih kuat perlu mengukur apakah perempuan pelaku usaha mengalami peningkatan kepercayaan diri digital, perilaku daring yang lebih aman, pencatatan keuangan yang lebih baik, komunikasi pelanggan yang lebih kuat, kesadaran terhadap pilihan pembiayaan, dokumentasi produk yang lebih rapi, dan keterlibatan dalam pendampingan sejawat.

Dalam kasus Filipina, hasil yang dapat diukur perlu difokuskan pada kapabilitas keuangan dan kesiapan usaha. Indikatornya mencakup kemampuan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, menyusun catatan transaksi sederhana, memahami syarat pembiayaan, menggunakan dompet digital secara aman, menyiapkan profil usaha dasar, memahami risiko perlindungan konsumen, dan mengidentifikasi dukungan pemerintah atau organisasi masyarakat yang relevan. Pentingnya hasil tersebut didukung oleh analisis ADB mengenai inklusi keuangan dan kewirausahaan perempuan di Filipina yang menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan UMKM (ADB, 2023). Temuan ini juga konsisten dengan analisis ILO yang menunjukkan bahwa informalitas masih menjadi persoalan struktural dalam ketenagakerjaan Asia-Pasifik, termasuk Asia Tenggara (ILO, 2024). Perempuan pelaku usaha yang belajar menggunakan dompet digital tetapi belum mampu mendokumentasikan penjualan, membandingkan pilihan kredit, atau



melindungi diri dari penipuan telah memperoleh paparan digital, tetapi belum mengalami pemberdayaan secara penuh.

Dalam kasus Vietnam, hasil yang dapat diukur perlu berfokus pada kapabilitas kolektif dan ketahanan koperasi. Indikatornya mencakup penggunaan teknologi informasi untuk ketertelusuran produk, pencatatan digital bersama, merek koperasi, komunikasi yang lebih aman dengan pembeli, pengajaran antarsejawat, dan peningkatan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan digital. Inisiatif RMIT Vietnam penting secara analitis karena menunjukkan mekanisme transfer pengetahuan dari perempuan yang dilatih kepada kelompok perempuan yang lebih luas (RMIT University Vietnam, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat diukur tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga melalui kapasitas difusi: apakah peserta menjadi fasilitator, mentor, dan penerjemah pengetahuan digital dalam komunitasnya.

Perbandingan lintas kasus menunjukkan bahwa hasil pemberdayaan dibentuk oleh jalur kelembagaan. Di Filipina, domain hasil paling kuat berkaitan dengan **navigasi keuangan**, karena masalahnya berkaitan erat dengan akses kredit, dokumentasi bisnis, dan dukungan formal. Di Vietnam, domain hasil paling kuat berkaitan dengan **kapabilitas pasar kolektif**, karena model koperasi memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat ketertelusuran, branding, dan pembelajaran bersama. Kedua kasus menunjukkan bahwa pemberdayaan bersifat relasional. Agency perempuan berkembang ketika keterampilan individual didukung oleh jaringan, lembaga, dan mekanisme kolektif.

Temuan ini berkontribusi pada teori pemberdayaan komunitas dengan memperhalus triad Kabeer (1999) tentang resources, agency, dan achievements. Pelatihan digital menyediakan resources; pembelajaran partisipatif memperkuat agency; perbaikan praktik bisnis, perilaku daring yang lebih aman, dan transfer pengetahuan kolektif merepresentasikan achievements. Hubungan tersebut tidak linear. Sumber daya dapat gagal menghasilkan capaian apabila perempuan kekurangan waktu, kepercayaan diri, dukungan rumah tangga, akses pembiayaan, atau pengakuan kelembagaan. Dengan demikian, penguatan kapasitas berperan sebagai mediator antara intervensi dan perubahan berkelanjutan.

Tabel 1. Matriks Komparatif Masalah Komunitas, Intervensi Partisipatif, Mekanisme Pemberdayaan, dan Hasil Terukur

Varia bel	Komunita s/Kasus Filipina	Komunita 1: s/Kasus Vietnam	Komunita 2: s/Kasus Vietnam	Bukti Empiris	Interpr etasi Analitis
Varia si masalah komunitas	Perempua n pelaku usaha mikro menghadapi	Perempua n produsen menghadapi tantangan	Perempua n produsen menghadapi tantangan	ADB menyoroti kendala pembiayaan	Masala h Filipina terutama bersifat



	hambatan pembiayaan, dokumentasi usaha, keamanan pembayaran digital, akses pasar, dan dukungan formal.	keamanan digital, ketertelusuran produk, pemasaran koperasi, dan adopsi digital berbasis sejawat.	UMKM perempuan di Filipina; IIED mendokumen tasikan penggunaan teknologi informasi pada Tu Nhien Cooperative; RMIT mendokumen tasikan pelatihan literasi digital bagi perempuan wirausaha di Hanoi dan Ho Chi Minh City.	finansial-kelembagaan, sedangkan masalah Vietnam bersifat koperatif-pasar. Keduanya membutuhkan pemberdayaan yang melampaui pelatihan teknis.
Konteks sosial dan kelembagaan	Struktur barangay, kantor usaha lokal, NGO, dan lembaga keuangan penting bagi keberlanjutan intervensi.	Koperasi, jaringan perempuan, asosiasi lokal, dan inisiatif pelatihan universitas membentuk difusi pengetahuan.	OECD menekankan dukungan berbasis tempat bagi kewirausahaan perempuan; RMIT menunjukkan mekanisme transfer pengetahuan kepada jaringan perempuan yang lebih luas.	Desain pengabdian masyarakat harus menyesuaikan diri dengan ekologi kelembagaan lokal, bukan menggunakan model regional yang seragam.
Mekanisme	Pemetaan kebutuhan,	Pelatihan teknologi	Toolkit ASEAN	Partisipasi efektif



intervensi partisipatif	pelatihan keuangan digital, pendampingan pembukuan, dukungan kesiapan pembiayaan, dan keamanan digital.	informasi koperasi, dukungan ketertelusuran, pendampingan sejawat, keamanan digital, dan dokumentasi produk bersama.	menekankan pemantauan responsif gender; ERIA menekankan keterampilan digital, kesenjangan gender, keuangan digital, dan pemberdayaan UMKM.	ketika perempuan ikut menentukan prioritas pelatihan dan menghubungkan pembelajaran dengan kendala usaha nyata.
Proses penguatan kapasitas	Pendampingan individu dan kelompok kecil memperkuat literasi pembayaran digital, pencatatan usaha, dan navigasi kelembagaan.	Pembelajaran sejawat memperkuat ketertelusuran, branding kolektif, dan rutinitas digital koperasi.	RMIT Vietnam menunjukkan model transfer pengetahuan; IIED memperlihatkan penggunaan teknologi informasi koperasi sebagai mekanisme pemberdayaan perempuan.	Penguatan kapasitas berfungsi sebagai mediator antara pelatihan dan perubahan perilaku.
Indikator perubahan perilaku atau sosial	Penggunaan pembayaran digital yang lebih aman, catatan keuangan yang lebih baik, kepercayaan terhadap sistem dukungan formal, dan komunikasi	Perilaku daring yang lebih aman, dokumentasi produk yang lebih baik, penggunaan teknologi informasi untuk ketertelusuran, dan peningkatan	Kekhawatiran keamanan digital perempuan berpenghasilan rendah di Vietnam mencakup verifikasi informasi dan	Hasil paling bermakna bukan angka kehadiran, melainkan perubahan praktik, kepercayaan diri, dan pengambilan



	pelanggan yang lebih efektif.	kapasitas mengajar sejawat.	risiko privasi; ASEAN dan ERIA menegaskan bahwa literasi digital lebih luas daripada konektivitas.	keputusan yang lebih aman.
Kolaborasi pemangku kepentingan	Pemerintah lokal, lembaga keuangan, kelompok wirausaha perempuan, universitas, dan NGO.	Koperasi, organisasi perempuan, universitas, kelompok produsen, dan aktor pembangunan lokal.	ASEAN Vision 2045 menekankan partisipasi pemangku kepentingan yang inklusif dan bermakna; OECD menekankan dukungan berbasis tempat.	Kolaborasi multipihak memperkuat keberlanjutan apabila peran jelas dan dimiliki secara lokal.
Hasil pemberdayaan komunitas	Agency keuangan, kesiapan formalisasi usaha, transaksi digital yang lebih aman, dan akses lebih baik terhadap program dukungan.	Agency kolektif, kapasitas ketertelusuran, visibilitas pasar koperasi, dan difusi pengetahuan digital berbasis sejawat.	ADB, OECD, IIED, dan RMIT mendukung relevansi domain hasil tersebut.	Pemberdayaan mengambil bentuk kelembagaan berbeda: navigasi keuangan individual di Filipina dan kapabilitas kooperatif kolektif di Vietnam.
Implikasi keberlanjutan	Keberlanjutan bergantung pada pendampingan	Keberlanjutan bergantung pada tata kelola koperasi, mentor	Toolkit ASEAN menekankan data dasar,	Pengabdian masyarakat berkelanjutan



pascalatihan, sistem rujukan, basis data usaha lokal, dan pemantauan responsif gender.	sejawat, jaringan perempuan, dan adaptasi teknologi informasi berkelanjutan.	pemantauan, dan dukungan kelembagaan; ERIA menekankan indikator inklusi digital yang terukur.	memerlukan kepemilikan lokal, indikator terukur, dan integrasi dalam lembaga yang sudah ada.
--	--	---	--

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan regional yang sama, yaitu eksklusi digital-ekonomi perempuan, membutuhkan arsitektur pengabdian masyarakat yang berbeda. Program literasi digital yang seragam kemungkinan hanya menghasilkan capaian permukaan karena mengabaikan cara perempuan pelaku usaha mengakses pasar, pembiayaan, dan dukungan sosial dalam konteks masing-masing. Kasus Filipina membutuhkan hubungan yang lebih kuat antara pembelajaran digital dan inklusi keuangan. Kasus Vietnam membutuhkan hubungan yang lebih kuat antara pembelajaran digital dan sistem pasar koperasi. Oleh karena itu, kajian pengabdian masyarakat perlu bergerak dari perbandingan berbasis aktivitas menuju perbandingan berbasis mekanisme. Pertanyaannya bukan hanya apakah kedua komunitas menerima pelatihan literasi digital, melainkan bagaimana intervensi tersebut mengaktifkan mekanisme pemberdayaan dalam kondisi kelembagaan yang berbeda.

4. Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Keberlanjutan Kelembagaan

Keberlanjutan intervensi sangat bergantung pada apakah pengabdian masyarakat tertanam dalam lembaga lokal atau hanya hadir sebagai proyek yang terpisah. Dalam kasus Filipina, keberlanjutan membutuhkan koordinasi antara pemimpin barangay, kantor usaha lokal, asosiasi perempuan wirausaha, lembaga keuangan mikro, universitas, dan NGO. Setiap pemangku kepentingan memiliki fungsi berbeda. Pemerintah lokal dan barangay membantu mengidentifikasi peserta dan menjaga legitimasi komunitas. Lembaga keuangan menyediakan informasi tentang produk yang sesuai dan perlindungan konsumen. Universitas dan NGO mendukung desain kurikulum, pendampingan, dan evaluasi. Kelompok perempuan wirausaha menyediakan akuntabilitas sejawat dan kesinambungan setelah pelatihan formal berakhir.

Dalam kasus Vietnam, keberlanjutan lebih bergantung pada tata kelola koperasi, jaringan perempuan, dan pendidik sejawat. Struktur koperasi menyediakan rumah kelembagaan bagi pembelajaran berkelanjutan, dokumentasi produk, dan praktik digital bersama. Contoh RMIT penting secara analitis karena perempuan yang telah dilatih meneruskan pengetahuan kepada jaringan yang lebih luas, sehingga keberlanjutan pengabdian masyarakat dapat diperkuat melalui model train-the-facilitator (RMIT University Vietnam, 2024). Kasus Tu Nhien Cooperative juga menunjukkan bahwa



teknologi informasi menjadi bermakna ketika terhubung dengan produksi kolektif dan ketertelusuran produk, bukan diperlakukan sebagai keterampilan terpisah (Nhuan, 2024).

Perbandingan ini memperlihatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing model. Model Filipina dapat kuat dalam inklusi keuangan apabila sistem rujukan kelembagaan berjalan efektif, tetapi lemah apabila perempuan dilatih tanpa dukungan lanjutan atau apabila lembaga keuangan menetapkan syarat yang tetap sulit diakses. Model Vietnam dapat kuat dalam difusi sejawat dan pembelajaran koperatif, tetapi lemah apabila perangkat teknologi informasi bergantung pada dukungan teknis eksternal atau apabila kepemimpinan koperasi tidak melembagakan praktik digital. Dengan demikian, keberlanjutan bergantung pada keselarasan pelatihan, tata kelola lokal, pembiayaan, kepemimpinan sejawat, dan pemantauan.

Temuan ini mencerminkan pandangan Ostrom (1990) bahwa aksi kolektif bergantung pada aturan kelembagaan, kepercayaan, pemantauan, dan kepemilikan lokal. Temuan ini juga mendukung teori inovasi sosial kontemporer yang menyatakan bahwa perubahan komunitas berkelanjutan muncul ketika praktik baru tertanam dalam jaringan dan lembaga, bukan tetap bergantung pada fasilitator eksternal. Secara praktis, program pengabdian masyarakat perlu menyertakan kalender pendampingan pascapelatihan, kader digital lokal, direktori rujukan, pusat bantuan komunitas, pertemuan evaluasi sejawat, dan alat pemantauan sederhana. Tanpa mekanisme tersebut, pelatihan literasi digital berisiko menjadi kegiatan sesaat, bukan proses pemberdayaan yang bertahan.

5. Implikasi Teoretis dan Pembangunan Asia Tenggara

Artikel ini berkontribusi pada kajian pengabdian masyarakat dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan digital-ekonomi partisipatif di Asia Tenggara harus dianalisis sebagai rantai kausal, bukan sekadar kumpulan aktivitas. Temuan komparatif menunjukkan bahwa kerentanan komunitas dapat dikurangi hanya ketika intervensi partisipatif mengaktifkan mekanisme pemberdayaan yang sesuai dengan konteks lokal. Di Filipina, mekanisme tersebut berupa navigasi keuangan dan kesiapan usaha. Di Vietnam, mekanisme tersebut berupa kapasitas teknologi informasi koperasi dan difusi sejawat. Kedua jalur menunjukkan bahwa pemberdayaan memerlukan konversi pengetahuan menjadi agency dan konversi agency menjadi praktik sosial yang berkelanjutan.

Implikasi lebih luas bagi Asia Tenggara adalah bahwa pengabdian masyarakat harus merespons transformasi digital kawasan yang tidak merata. Ekonomi digital ASEAN menawarkan peluang besar, tetapi analisis ERIA mengingatkan bahwa inklusi memerlukan perhatian pada populasi tertentu, kesenjangan desa-kota, ketimpangan gender, keuangan digital, dan pemberdayaan UMKM (Sefrina, 2024). Laporan UNESCO tentang teknologi dalam pendidikan di Asia Tenggara juga mengajukan pertanyaan penting mengenai atas syarat siapa teknologi digunakan, sehingga mengingatkan



pembuat kebijakan dan pendidik bahwa perangkat digital tidak secara inheren adil (UNESCO, 2023). Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat perlu menghindari determinisme teknologi. Nilai teknologi bergantung pada apakah komunitas dapat menggunakannya secara aman, kritis, dan produktif.

Temuan ini juga memiliki implikasi kebijakan. Pertama, pemerintah lokal perlu mengintegrasikan literasi digital dan keuangan ke dalam sistem dukungan UMKM, bukan memperlakukannya sebagai program terpisah. Kedua, basis data usaha perempuan perlu diperkuat melalui pemantauan terpisah berdasarkan gender sebagaimana direkomendasikan dalam toolkit ASEAN tentang kewirausahaan perempuan (ASEAN Secretariat, 2022). Ketiga, universitas perlu merancang kurikulum pengabdian masyarakat yang mencakup keamanan digital, kapabilitas keuangan, etika platform, dan evaluasi partisipatif. Keempat, donor dan NGO sebaiknya mendukung mentor sejawat dan pelatih lokal, bukan hanya lokakarya satu kali. Kelima, kerangka ASEAN perlu mengembangkan indikator yang dapat dibandingkan untuk mengukur pemberdayaan digital-ekonomi tingkat komunitas, termasuk keterampilan, kepercayaan diri, keamanan, akses keuangan, akses pasar, dan partisipasi kelembagaan.

Implikasi teoretisnya adalah bahwa kajian pengabdian masyarakat perlu mengintegrasikan teori pemberdayaan dengan hasil sosial yang terukur. Partisipasi bermakna hanya ketika memengaruhi desain program dan memperkuat agency. Penguatan kapasitas bermakna hanya ketika menghasilkan perubahan perilaku. Keberlanjutan bermakna hanya ketika aktor lokal mampu melanjutkan, menyesuaikan, dan mengelola intervensi. Bukti komparatif menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat di Asia Tenggara memerlukan pendekatan kapabilitas partisipatif, yaitu intervensi yang memperluas apa yang dapat dilakukan, diputuskan, dipertahankan, dan ditransformasikan oleh komunitas.

Kerangka Konseptual

Kerentanan Komunitas → Asesmen Kebutuhan Partisipatif → Intervensi Literasi Digital dan Keuangan → Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Sejawat → Agency Individual dan Kolektif → Ketahanan Penghidupan Berkelanjutan

Kerangka konseptual ini mengusulkan bahwa pengabdian masyarakat menjadi transformatif secara sosial apabila bergerak melalui enam tahap yang saling terhubung. Pertama, kerentanan komunitas dipahami sebagai persilangan antara eksklusi digital, hambatan usaha berbasis gender, keterbatasan pembiayaan, informalitas kerja, akses pasar yang lemah, dan fragmentasi kelembagaan. Kedua, asesmen kebutuhan partisipatif memastikan bahwa intervensi dimulai dari masalah yang didefinisikan komunitas, bukan dari asumsi eksternal. Ketiga, intervensi literasi digital dan keuangan menyediakan pengetahuan praktis mengenai penggunaan platform yang aman, pembayaran digital, pembukuan, komunikasi pelanggan, dokumentasi produk, ketertelusuran, dan pengambilan keputusan finansial. Keempat, penguatan kapasitas



dan pendampingan sejawat mengubah pengetahuan menjadi praktik berulang melalui fasilitator lokal, pembelajaran koperatif, dan dukungan pascapelatihan. Kelima, agency individual dan kolektif muncul ketika perempuan pelaku usaha memperoleh kepercayaan diri, membuat pilihan yang lebih aman, memperbaiki rutinitas usaha, dan berpartisipasi lebih aktif dalam sistem pasar dan kelembagaan. Keenam, ketahanan penghidupan berkelanjutan tercapai ketika praktik-praktik tersebut berlanjut melampaui intervensi melalui kepemilikan lokal, kolaborasi pemangku kepentingan, pemantauan, dan adaptasi.

Kerangka ini memajukan kajian pengabdian masyarakat dalam tiga hal. Pertama, ia menolak asumsi bahwa pelatihan secara otomatis menghasilkan pemberdayaan. Sebaliknya, penguatan kapasitas diposisikan sebagai proses mediasi antara intervensi dan hasil. Kedua, kerangka ini membedakan agency individual dan agency kolektif. Jalur Filipina menunjukkan pentingnya navigasi keuangan individual dan kesiapan usaha, sedangkan jalur Vietnam menunjukkan pentingnya pembelajaran koperatif dan difusi sejawat. Ketiga, kerangka ini menghubungkan keberlanjutan dengan pelebagaan lokal. Program dinilai berkelanjutan bukan karena peserta menghadiri pelatihan, melainkan karena aktor lokal dapat terus mendampingi, memantau, menyesuaikan, dan mengelola proses pemberdayaan.

Kesimpulan

Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana intervensi literasi digital dan keuangan berbasis partisipasi dapat memperkuat hasil pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro di Filipina dan Vietnam. Analisis komparatif menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat paling efektif ketika mampu menghubungkan masalah komunitas, intervensi partisipatif, mekanisme pemberdayaan, hasil terukur, dan implikasi keberlanjutan dalam satu theory of change yang koheren. Literasi digital memang diperlukan, tetapi tidak memadai apabila perempuan pelaku usaha masih menghadapi eksklusi keuangan, kondisi usaha informal, akses pasar yang lemah, risiko keamanan digital, beban perawatan domestik, dan dukungan kelembagaan yang tidak merata. Temuan utama artikel ini adalah bahwa pemberdayaan tidak terjadi melalui paparan teknologi semata, melainkan melalui konversi pengetahuan digital menjadi agency, perilaku yang lebih aman, kapabilitas usaha, pembelajaran sejawat, dan partisipasi kelembagaan.

Kasus Filipina menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro sangat bergantung pada kapabilitas digital-keuangan, dokumentasi usaha, transaksi digital yang aman, dan akses terhadap ekosistem dukungan usaha. Kasus Vietnam menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi koperasi, ketertelusuran produk, pendampingan sejawat, dan difusi pengetahuan berbasis jaringan perempuan. Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat di Asia Tenggara tidak dapat mengandalkan template pelatihan yang seragam. Intervensi harus disesuaikan dengan



ekologi kelembagaan lokal, termasuk barangay, koperasi, organisasi perempuan, pemerintah lokal, universitas, NGO, dan lembaga keuangan.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada kerangka kapabilitas partisipatif. Dengan mengintegrasikan pedagogi kritis Freire, teori pemberdayaan Kabeer, pendekatan kapabilitas Sen, dan perdebatan inklusi digital kontemporer, artikel ini menjelaskan bagaimana pengabdian masyarakat dapat bergerak dari penyampaian aktivitas menuju pemberdayaan yang terukur. Kontribusi empirisnya terletak pada interpretasi komparatif atas bukti Asia Tenggara yang terdokumentasi tanpa mengklaim statistik lapangan yang tidak tersedia. Kontribusi praktisnya terletak pada identifikasi domain hasil yang dapat diukur oleh program pengabdian masyarakat masa depan, yaitu kepercayaan diri digital, perilaku platform yang aman, pencatatan keuangan, dokumentasi usaha, visibilitas pasar, ketertelusuran koperasi, pendampingan sejawat, dan kesinambungan kelembagaan.

Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan UMKM, dukungan kewirausahaan perempuan, program inklusi keuangan, dan pendidikan berbasis komunitas. Bagi universitas, temuan ini mengimplikasikan bahwa pengabdian masyarakat perlu dirancang sebagai keterlibatan partisipatif jangka panjang, bukan sekadar kegiatan penyuluhan singkat. Bagi NGO dan lembaga pembangunan, temuan ini menekankan pentingnya fasilitator sejawat, kepemilikan lokal, dan pendampingan pascapelatihan. Bagi agenda pembangunan ASEAN, artikel ini menegaskan perlunya indikator tingkat komunitas yang tidak hanya mengukur konektivitas, tetapi juga keterampilan digital, keamanan, pembiayaan, inklusi gender, dan ketahanan usaha.

Artikel ini memiliki keterbatasan. Kajian ini berbasis bukti dokumenter dan komparatif, bukan eksperimen lapangan primer, sehingga tidak mengklaim statistik survei yang belum dipublikasikan atau pengukuran kausal langsung. Penelitian dan pengabdian masyarakat berikutnya perlu menerapkan kerangka ini melalui participatory action research longitudinal, asesmen pra- dan pascaintervensi, pemantauan yang dikendalikan komunitas, serta validasi lapangan komparatif di konteks Asia Tenggara lainnya. Program berikutnya juga perlu mengkaji keamanan digital, ketergantungan platform, risiko usaha akibat perubahan iklim, inklusi disabilitas, dan partisipasi pemuda dalam ekosistem UMKM perempuan. Pada akhirnya, artikel ini menunjukkan bahwa pemberdayaan digital-ekonomi partisipatif bukan agenda pinggiran dalam pengabdian masyarakat, melainkan bagian penting dari pembangunan Asia Tenggara yang lebih inklusif, tangguh, dan berpusat pada manusia.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh komunitas perempuan pelaku usaha mikro, organisasi pendamping, koperasi lokal, lembaga pengembangan masyarakat, serta pemangku kepentingan di Filipina dan Vietnam yang telah menjadi sumber inspirasi penting dalam pengembangan gagasan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada berbagai lembaga regional dan internasional yang menyediakan



laporan, data kebijakan, serta kajian pembangunan yang relevan mengenai pemberdayaan perempuan, literasi digital, inklusi keuangan, dan penguatan UMKM di Asia Tenggara.

Penulis juga menghargai kontribusi akademik dari para peneliti dan praktisi pengabdian masyarakat yang telah memperkaya diskursus mengenai pemberdayaan komunitas, partisipasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pengabdian masyarakat yang lebih partisipatif, terukur, dan berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas perempuan pelaku usaha mikro di kawasan Asia Tenggara.

Referensi

- Asian Development Bank. (2023). *Measuring progress on women's financial inclusion and entrepreneurship in the Philippines*. Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2024). *Asia-Pacific climate report 2024: Catalyzing finance and policy solutions*. Asian Development Bank.
- ASEAN Secretariat. (2016). *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2022). *Strengthening women's entrepreneurship in national micro, small and medium enterprise policies and action plans*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2025). *ASEAN Community Vision 2045: Resilient, innovative, dynamic, and people-centred ASEAN*. ASEAN Secretariat.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- GSMA. (2025). *The mobile economy Asia Pacific 2025*. GSMA.
- International Finance Corporation. (2021). *Women and e-commerce in Southeast Asia*. International Finance Corporation.
- International Labour Organization. (2024). *Integrated approaches for formalization in Asia and the Pacific*. International Labour Organization.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Lokuge, S., & Duan, S. (2023). Exploring the enablers of digital transformation in small and medium-sized enterprises. *Information Systems and e-Business Management*, 21(2), 315–337.
- Nhuan, N. H. (2024). *How ICT is empowering women entrepreneurs in Vietnam: A case study of Tu Nhen Cooperative*. International Institute for Environment and Development.
- OECD. (2025). *Women entrepreneurship in remote areas in Indonesia and the Philippines*. OECD Publishing.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pascua-Valenzuela, E. A. (2025). *Digital literacy and transformation in ASEAN: A call for education policy reforms*. ASEAN Socio-Cultural Community Research and Development Platform.



- RMIT University Vietnam. (2024). *Digital literacy skill enhancement for women entrepreneurs*. RMIT University Vietnam.
- Sefrina, M. (2024). *An inclusive digital economy in the ASEAN region*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the gridlock—Reimagining cooperation in a polarized world*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report Southeast Asia 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO.
- World Bank. (2024). *Digital progress and trends: Strengthening AI foundations*. World Bank.
- World Health Organization. (2024). *Regional health priorities and community resilience in Asia*. World Health Organization.